

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mampu mengoptimalkan dana alokasi belanja modal dengan baik, sehingga berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Hal ini dilihat dari realisasi Belanja Modal yang tidak mencapai target anggaran. Pertumbuhan belanja modal per tahun sebaiknya harus lebih ditingkatkan daripada belanja pegawai, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten / kota sehingga kinerja keuangan daerah setiap tahunnya meningkat.
2. Faktor penyebab terjadinya fluktuasi pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 – 2017 adalah DIPA yang terlambat turun, adanya proyek fisik yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik dan kurangnya perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan penggunaan anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggungjawab mengurus keluar – masuknya dana anggaran alokasi

belanja modal harus lebih tergas untuk memprioritaskan dana yang ada untuk kepentingan publik. Didalam penyusunan program alokasi belanja modal pun, pemerintah harus benar – benar melakukan survey terlebih dahulu ke lapangan agar tepat sasaran sehingga tidak ada perencanaan program yang berubah lagi setelah anggaran direalisasikan. Bagi pegawai BPPKAD khususnya bidang Akuntansi dan Laporan Akuntansi yang bergelar sarjana tetapi jurusannya tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, dapat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam perhitungan dan ketajaman analisa keuangan sehingga akan memberikan pengaruh positif yang akan menjadikan kesehatan finansial instansi terjaga dengan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperluas ruang lingkup dari penelitian ini dengan menambah beberapa variabel yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Anderson, Gordon C, 1993. *Managing Performance Appraisal System*, Blackwell.London,Uk.
- Anggraeni, Astrid. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta*. [Skripsi]. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bulletin Teknis Nomor 4 Tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Yaslis. 2005. *Kinerja Teori, Penilaian dan Penelitian*, Jakarta: Pusat Kajian.
- Junaedi, 2002. *Balance Scorecard : Pengukuran Kinerja Pada Pemerintah Daerah*.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mulyadi dan Johny Setyawan. 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nordiawan, Deddi (2006) *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. [Skripsi]. Jawa Tengah. Universitas Diponegoro Semarang.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang *Penggunaan Belanja Modal*.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siswoyo. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kinerja Keuangan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015*. [Skripsi]. Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sularso, Hafidz. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. [Skripsi] Jawa Tengah. Universitas Jenderal Soedirman.

_____ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok – Pokok Pemerintah Daerah*.

_____ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

_____ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

_____ Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Veithzal, Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.